



Pemkab Sambas Sampaikan LKPD 2020 ke BPK



IST.
(LKPD) Tahun 2020 kepada Badan Pemeriksa

SERAHKAN LKPD - Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili secara resmi menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Keuangan RI di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Senin (15/3).



▶ Berharap Raih WTP

SAMBAS, SP - Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili secara resmi menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Penyerahan tersebut dilaksanakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Senin (15/3).

Penyampaian LKPD 2020 Sambas ke BPK bersamaan dengan LKPD Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau. Dari Kabupaten Sambas, diserahkan langsung bupati disaksikan Sekda Kabupaten Sambas, inspektur Kabupaten Sambas dan kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.

Bupati menjelaskan, penyampaian LKPD itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tepatnya Pasal 191 Ayat 2.

"Sesuai aturan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir," tutur Bupati.

Dijelaskan Bupati, Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 ini merupakan tahun keenam bagi pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya.

"Dengan penerapan

laporan keuangan berbasis akrual, pemerintah daerah dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaan serta perubahan kekayaan, hasil operasi, serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebih," ungkap Bupati.

Kondisi pengelolaan keuangan pemerintah daerah sampai saat ini, menurut Bupati, belum sempurna dan masih membutuhkan penyempurnaan.

Misalnya masih diperlukan arahan dan bimbingan dari Lembaga Pemeriksa Keuangan, sehingga ke depan kualitas atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih akuntabel dan diharapkan akan memperoleh opini yang lebih baik.

"Opini BPK RI atas laporan keuangan merupakan suatu cerminan dan salah satu tolok ukur atau indikator penilaian akuntabilitas pemerintah daerah," jelas Bupati.

Ditambahkan Atbah, masyarakat, sebagai pengguna utama hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana capaian pelaksanaan mandat mereka. Masyarakat, lanjut dia, dapat menilai bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah melalui opini yang dikeluarkan.

"Secara tersirat, asas keterbukaan informasi publik dipenuhi dengan adanya hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan," ung-



kap Bupati.

Diterangkan Bupati, opini atas laporan keuangan akan menciptakan reputasi yang dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan atas laporan keuangan yang disajikan.

Tingkatan opini yang paling diharapkan dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan, menurut bupati, adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Dengan memperoleh opini (WTP) tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi," katanya.

"Bagi pemerintah daerah semoga tahun ini dapat meraih kualitas opini yang lebih baik. Dari yang semula belum WTP menjadi WTP, dan yang sudah meraih WTP dapat mempertahankan serta meningkatkan kualitasnya," imbuhnya.

Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas, Bagus Setiadi berharap LKPD Kabupaten Sambas tahun 2020 mendapat pe-



“

Atbah Romin Suhaili
Bupati Sambas

Bagi pemerintah daerah semoga tahun ini dapat meraih kualitas opini yang lebih baik. Dari yang semula belum WTP menjadi WTP, dan yang sudah meraih WTP dapat mempertahankan serta meningkatkan kualitasnya,” imbuhnya.

nilai WTP.

“Tentunya ini akan menjadi cerminan bagaimana Kabupaten Sambas mampu melaksanakan tugas administratif dengan baik, taat asas dan aturan,” kata anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sambas tersebut.

Pihaknya, kata Bagus, sudah melaksanakan berbagai macam pertemuan, rapat-rapat anggaran dengan harapan penggunaan anggaran

pembangunan selaras bersama keteraturan secara administratif.

“Opini WTP adalah buah kerja sama serta sinergitas yang baik antar lembaga eksekutif dan legislatif. Kita berusaha mengatur penggunaan anggaran pembangunan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dan selaras dengan administrasi, aturan serta perundang-undangan,” pungkasnya. **(noi)**